

MODEL KONSEPTUAL HUBUNGAN BIAYA TRANSAKSI DAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO

Brigita Kinari Ade Letelay¹, Florentinus Nugro Hardianto²

^{1,2}Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma
e-mail: ¹brigita.kinari16@gmail.com; ²flnugroho@gmail.com

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan dengan produk KUR sebagai implementasi fungsi intermediasinya tidak lepas dari biaya transaksi. Biaya transaksi merupakan salah satu kajian menarik yang acap kali dibahas dalam Ilmu Ekonomi Kelembagaan. Biaya transaksi dapat disebabkan banyak faktor. Di sisi lain, volume penyaluran KUR terkhusus mikro di Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan seperti yang terjadi pada BRI dan BCA. Kondisi demikian menunjukkan bahwa penyebab perbedaan jumlah debitur pada kedua bank tersebut adalah besarnya biaya transaksi yang kemudian mempengaruhi volume penyaluran KUR mikro. Artikel ini bertujuan untuk membangun model konseptual hubungan biaya transaksi dan volume penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro. Artikel ini menggunakan metode review literature untuk membangun model konseptual tersebut. Hasil analisis memberi gambaran lebih komprehensif tentang model hubungan biaya transaksi dan penyaluran KUR mikro. Model konseptual ini menjelaskan faktor penyebab, jenis, serta komponen biaya transaksi yang muncul dalam penyaluran KUR mikro sehingga mempengaruhi preferensi debitur maupun keputusan kreditur untuk menerima atau menyalurkan KUR mikro.

Kata kunci: *fungsi intermediasi bank, biaya transaksi, penyaluran KUR mikro, penyebab biaya transaksi, jenis biaya transaksi, komponen biaya transaksi, hubungan biaya transaksi dan penyaluran KUR mikro*

PENDAHULUAN

Biaya transaksi berhubungan erat dengan aktivitas transaksi ekonomi. Biaya transaksi sebagai biaya yang muncul dari proses pencarian informasi, transfer, koordinasi, pengadaan, pemasaran, periklanan, penjualan, penyelesaian hukum serta biaya manajemen dan pengawasan (Wallis dan North, 1986 dalam Georgescu et,al 2015). Biaya transaksi adalah biaya untuk melakukan identifikasi, eksplorasi, dan mitigasi semua bentuk biaya kontrak dan juga berfokus pada pengaturan kelembagaan tempat transaksi tersebut dinegosiasi dan direalisasikan (Williamson, 2000). Terkait dengan definisi Williamson, lebih lanjut berkaitan dengan aktivitas transaksi ekonomi diatur dalam tingkatan ketiga institusi yaitu terkait dengan tata kelola (*governance*) yang baik agar biaya transaksi (*transaction costs*) dapat diminimumkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan, pengaturan, dan penegakan sistem kontrak dengan baik. Sistem tata kelola ini bertujuan untuk menciptakan tatanan (*order*) yang baik agar dapat mengurangi konflik dan menghasilkan manfaat bersama (*mutual gains*) dalam melakukan aktivitas transaksi ekonomi.

Lembaga keuangan yang melakukan aktivitas transaksi ekonomi adalah bank. Bank berfungsi sebagai perantara dan penyedia layanan transaksi keuangan berupa produk tertentu seperti tabungan, investasi,

konsumsi, kredit, dan beberapa fasilitas lainnya. Melalui fungsi ini bank berkontribusi dalam pertumbuhan keuangan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Krusialnya fungsi yang disebut dengan intermediasi ini mendorong sektor perbankan untuk dikelola dan dikembangkan secara efektif dan efisien. Dilihat dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, efisiensi bisa diukur dari berapa besarnya biaya transaksi yang muncul pada industri perbankan dalam melakukan aktivitas (Listiyanto, 2007). Salah satu aktivitas pendorong fungsi intermediasi perbankan yang memunculkan biaya transaksi adalah produk kredit. Bagi bank, pemberian kredit dapat melibatkan biaya transaksi yang tinggi karena informasi asimetris, *bounded rationality*, perilaku oportunistik, dan struktur regulasi bank penyedia. Variabel lainnya yang dapat menentukan besarnya biaya transaksi adalah tingkat kepercayaan atau hubungan spesifitas, dan ukuran pinjaman.

Di tahun 2007, untuk merespons fungsi intermediasi bank dalam pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan produk kredit yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bank komersial sebagai salah satu penyalurnya. Terdapat tiga jenis KUR berdasarkan kegiatan usaha, yaitu sector mikro, ritel, dan tenaga kerja Indonesia. Penelitian ini melihat volume penyaluran KUR pada salah satu sektornya, yaitu sektor mikro. Pada periode 2017, 2018, hingga April 2019, plafon

keseluruhan penyaluran KUR terus dinaikkan mulai dari Rp. 110.000.000.000.000 menjadi Rp. 120.000.000.000.000, dan Rp.140.000.000.000.000. BRI selaku Bank Pemerintah berhasil menarik jumlah debitur terbanyak dengan KUR Mikro total 3.663.479 jiwa, sedangkan BCA selaku Bank Swasta berhasil menarik jumlah debitur sebanyak 479 jiwa pada periode 2017. Di periode berikutnya, tepatnya tahun 2018, jumlah debitur KUR Mikro BRI mengalami peningkatan menjadi 3.879.016 jiwa, sedangkan BCA mengalami penurunan menjadi 418 jiwa. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga April 2019 jumlah debitur KUR Mikro BRI mencapai angka 1.608.025 jiwa dan BCA 242 jiwa. Salah satu penyebab perbedaan jumlah debitur pada kedua bank tersebut adalah besarnya biaya transaksi yang kemudian mempengaruhi volume penyaluran KUR mikro.

Sehubungan dengan itu, makalah ini akan mencoba untuk membuat suatu model konseptual biaya transaksi dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Indonesia. Model ini menjabarkan faktor penyebab, jenis, komponen, serta hubungan biaya transaksi dan penyaluran KUR mikro. Model ini dapat dikatakan sebagai model awal yang nantinya bisa digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis permasalahan penyaluran KUR mikro yang relative menurun akibat dari besarnya biaya transaksi. Harapannya juga bahwa model konseptual ini dapat bermanfaat untuk memahami biaya transaksi dalam KUR mikro di Indonesia secara lebih komprehensif sehingga nantinya bank mampu menetapkan kebijakan yang tepat tentang penetapan biaya transaksi untuk menunjang peran dan fungsi dari KUR mikro itu sendiri bagi perekonomian Indonesia..

Tinjauan Pustaka

2.1 Biaya Transaksi

Konsep tentang biaya transaksi pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Coase pada tahun 1937 lewat artikel yang berjudul "*The Nature of the Firm*". Menurutnya, biaya transaksi adalah biaya penggunaan mekanisme harga, yang berarti biaya melakukan transaksi dengan cara pertukaran dalam sistem pasar terbuka. Dalam penjelasannya, teori ekonomi ini menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks dimana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran. Biaya transaksi digunakan untuk mengukur efisien atau tidaknya suatu desain institusi. Semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi (transaksi), maka semakin tidak efisien institusi yang didesain. Definisi Coase ini menjadi asal mula biaya transaksi sebagai alat analisis yang populer dalam ilmu ekonomi kelembagaan. Mengikuti jejak Coase, banyak ahli yang kemudian mendefinisikan

biaya transaksi dalam berbagai makna, seperti Williamson, Furubotn dan Richter, dll.

Berkaitan dengan kredit, biaya transaksi didefinisikan sebagai sumber daya yang diperlukan untuk mentransfer satu unit mata uang dari saver ke peminjam, dan memulihkan unit mata uang tersebut di kemudian hari dengan bunga yang disepakati (Sharma, 2017). Jadi, penulis menyimpulkan bahwa biaya transaksi adalah biaya yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan akibat kedinamisan mekanisme pasar dalam proses pertukaran ekonomi seperti pencarian informasi, koordinasi, dan lain sebagainya sehingga menghasilkan tujuan dan sistem tata kelola yang ingin dicapai oleh suatu organisasi yang ada. Kedinamisan prakondisi dan kondisi aktivitas ekonomi melatarbelakangi munculnya biaya transaksi, dimana dalam *New Institutional Economic* faktor-faktor penting tersebut dibagi menjadi beberapa faktor. Terdapat tiga faktor penting yang berpengaruh pada biaya transaksi yaitu frekuensi, kekhususan aset, dan ketidakpastian (Neal, 2018). Serupa dengan itu, namun lebih spesifik melihat faktor paling kritis yang mempengaruhi biaya transaksi yang timbul adalah *bounded rationality*, perilaku oportunistik agen, dan informasi asimetris dalam pertukaran keuangan berupa tingkat spesifikasi aset, frekuensi transaksi, biaya tata kelola, dan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan pertukaran (Williamson, 1979). Jenis biaya transaksi dibagi berdasarkan dua hal, yaitu menurut wujud dan waktunya. Jenis biaya transaksi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua komponen yakni biaya eksplisit (langsung) dan biaya implisit (tidak langsung). Sedangkan berdasarkan waktu, biaya transaksi dibedakan menjadi dua yaitu biaya *ex ante* dan biaya *ex post*.

2.2 Biaya Transaksi dan KUR

Masalah klasik yang dihadapi golongan masyarakat menengah ke bawah maupun UMKM sebagai debitur yang dapat menerima KUR mikro adalah terbatasnya akses terhadap perbankan sebagai salah satu sumber permodalan terpenting. Perbankan enggan membuka akses kredit kepada mereka karena beberapa pertimbangan. Pertama, tingginya biaya transaksi (*transaction cost*) untuk menyeleksi, menyalurkan, memonitor dan mengumpulkan pembayaran kredit skala kecil kepada UMKM (Adam, 2010). Kedua, tingginya risiko kredit macet (*risk of loan default*) karena mereka belum memiliki pengalaman mengelola kredit dan belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik sehingga menyulitkan perbankan dalam menyeleksi dan menilai kelayakan usaha individu tersebut maupun UMKM (Adam, 2010; Nugroho, 2011). Ketiga, belum terbangunnya sistem penjaminan kredit skala kecil. Akibatnya, bank akan menilai kelayakan kredit dari sisi kemampuan UMKM menyediakan agunan. Keempat, bank memiliki keterbatasan operasional dalam melayani kredit skala kecil karena mereka terikat dan harus

mengikuti ketentuan-ketentuan *microprudential* perbankan. Misalnya, ketentuan adanya agunan kredit menyebabkan bank hanya akan melayani UMKM yang memiliki agunan (Nugroho, 2011).

Dalam konteks pembahasan ini, komponen biaya transaksi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu biaya transaksi diluar bank dan biaya transaksi di dalam bank (Hosen, 2013). Biaya diluar bank adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses aplikasi pelanggan KUR dan tidak secara resmi tercatat di bank. Sedangkan biaya transaksi didalam bank adalah biaya yang dikeluarkan nasabah bank dalam proses aplikasi KUR dan secara resmi dicatat oleh Bank. Biaya transaksi diluar bank termasuk biaya menyalin file yang dibutuhkan, biaya transportasi, biaya administrasi dokumen yang diperlukan, dan beban biaya kepada pelanggan untuk meninggalkan usahanya untuk memproses aplikasi KUR. Lain halnya dengan biaya transaksi di dalam bank yang seperti biaya pembukaan *passbook* bank, biaya administrasi, biaya jaminan, biaya asuransi, biaya notaris, bea materai dan biaya pendaftaran. Komponen biaya transaksi juga dapat dilihat dari pihak yang menanggung biaya tersebut. Pertama, biaya transaksi di sisi debitur yang dapat berupa biaya pengumpulan informasi, administrasi pinjaman, penegakan hukum (Masuko, 2003), layanan konsultasi teknis (Choundhury, 2004), penilaian peminjam dan dokumentasi hingga pencairan (Patil & Renade, 2006), dan pemantauan pinjaman (Shankar, 2007). Kedua, biaya transaksi di sisi kreditur seperti biaya pendaftaran, biaya layanan, biaya foto (Masuko, 2003), biaya peluang, biaya perjalanan (Hosseini, 2012), biaya tenaga ahli dan pengawas untuk melakukan pengawasan (Igwe, 2013), dan *success fee* (Gopar, 2010).

2.3 Penelitian Terdahulu

Tinjauan empiris pada penelitian ini menggunakan empat hasil penelitian yang diterbitkan secara online, baik yang sudah diterbitkan dalam jurnal ataupun hasil riset skripsi. Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan biaya transaksi kredit mikro tinggi dibedakan menjadi empat, yaitu informasi asimetris, *bounded rationality*, perilaku oportunistik, dan regulasi perbankan itu sendiri. Meyer & Carlos (1990), Masuko & Marufu (2003), Choudhury (2004), Listiyanto (2007), Antwi (2017), Sharma (2017) memberi hasil yang sama bahwa penyebab tingginya biaya transaksi dominan oleh adanya informasi asimetris. Biaya transaksi kredit mikro yang muncul untuk melakukan pertukaran keuangan menyebabkan proses transfer yang dilakukan pastinya memerlukan suatu perjanjian dan kesepakatan untuk meminimalkan risiko kedua belah pihak. Dalam proses pembuatan perjanjian tersebut, pihak kreditur akan berusaha mencari informasi selengkap-lengkapny

mengenai debitur. Namun pencarian informasi tersebut akan terus berkembang dan berimbas pada meningkatnya biaya transaksi. Salah satu bentuk informasi asimetris antara debitur dan kreditur tercermin dalam ketidakmampuan sebagian besar debitur untuk memberikan informasi keuangan yang sesuai dan rencana bisnis ataupun bisnis yang sedang dijalankan saat secara realistis.

Dalam menjelaskan pengaruh *bounded rationality* bagi biaya transaksi pada kredit mikro, Williamson (1981) mengungkapkan bahwa faktor kritis yang mempengaruhi biaya transaksi adalah *bounded rationality* (perilaku yang terbatas). Hal sama juga ditemukan dalam penelitian Emanuel (2016), walaupun tidak menganggapnya sebagai faktor kritis dibandingkan dengan faktor lainnya. *Bounded rationality* tidak langsung berdampak pada perubahan signifikan biaya transaksi, tetapi ditunjukkan melalui hubungan kontrak yang terjadi dalam proses kredit mikro. Ketidaktepatan hubungan kontrak yang terlampir dalam sebuah kesepakatan kontrak antara bank selaku organisasi dan debitur syarat akan pengupayaan pemenuhan kepentingan kedua belah pihak, berakibat meningkatkan biaya transaksi ekonomi. Selain itu, penetapan kontrak yang mengandung kebijakan birokrasi kontinu dan diskontinu seringkali menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan "*abuse of power*" oleh segelintir oknum sehingga memperbesar biaya transaksi pada kredit mikro. Kedua penjelasan tersebut mengarah pada kesenjangan informasi hubungan kontrak antara pihak-pihak yang bertransaksi sehingga mengarah pada praktik perilaku oportunistik, di mana satu pihak mengambil keuntungan dari kurangnya informasi dari pihak lain. Dengan kata lain, kondisi tersebut memicu pihak-pihak terlibat untuk mengambil langkah-langkah yang melindungi diri mereka sendiri dan berdampak pada kenaikan biaya transaksi.

Berbicara mengenai perilaku oportunistik seperti yang dijelaskan diatas, penelitian Saswati (2004) dan Henry (2010) mempertegas adanya faktor tersebut yang berpengaruh bagi biaya transaksi pada kredit mikro bank. Perilaku oportunistik dapat menghambat pertukaran yang meningkatkan pareto karena salah satu mitra memperjuangkan kepentingannya untuk mengambil alih *expost*. Ditambah dengan sudah adanya *bounded rationality* dan informasi asimetris akan semakin mempermudah salah satu pihak (umumnya bank penyedia kredit mikro) untuk memperbesar biaya transaksi. Oleh karena itu, tantangan sesungguhnya dalam persoalan biaya transaksi pada kredit mikro adalah merancang institusi di mana transaksi tidak mengarah pada oportunisme atau *moral hazard* yang merugikan. Terlepas dari biaya peluang dan informasi asimetris, serta tenaga dan waktu yang dihabiskan dalam merancang dan

menyusun kesepakatan transaksi kredit mikro antara debitur – kreditur.

Terakhir, penyebab yang mendorong tingginya biaya transaksi pada kredit mikro adalah struktur regulasi bank penyedia. Diantara penelitian-penelitian sebelumnya, Georgescu et.al (2015) mencantumkan keunikan factor penyebab yang tidak ditemukan di peneliti lainnya, yakni regulasi bank penyedia yang cenderung rumit untuk memperoleh kredit, beberapa lembaga perbankan memiliki sifat yang sangat pribadi, dan layanannya bersifat barang publik semu menyebabkan biaya transaksi kredit juga akan mengalami perbedaan. Apabila dilihat lebih jauh, hal ini terkait dengan pembahasan “tingkatan kedua” yaitu lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) yang sering juga disebut sebagai aturan main formal (Williamson, 2000). Institusi pada tingkatan ini berkaitan dengan aturan hukum, konstitusi, peraturan perundangan, lembaga-lembaga yudikatif, dan birokrasi. Penetapan institusi diharapkan akan menciptakan aturan main formal yang baik (*first-order economizing*) sehingga menciptakan kesesuaian antara kedua belah pihak dan menekan ketiga penyebab lainnya sehingga biaya transaksi rendah. Dengan demikian, regulasi bank penyedia kredit mikro sangatlah berpengaruh pada penetapan besaran biaya transaksi yang dikeluarkan dalam proses peminjaman.

KUR mikro yang merupakan Kredit Usaha Rakyat pada sektor mikro mengandung biaya transaksi yang dibagi dalam beberapa komponen. Penelitian sebelumnya di Indonesia yang langsung terkait dengan KUR menghasilkan biaya transportasi, biaya *entertainment*, biaya persyaratan, biaya *fee*, biaya suap, dan biaya ungkapan terimakasih (Gopar, 2010). Sedangkan peneliti Indonesia lainnya, menggolongkan menjadi biaya transaksi diluar bank berupa biaya transportasi, biaya fotocopy, dan biaya terkait pemerintah serta didalam bank seperti biaya pembukaan rekening, biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, biaya asuransi jaminan, biaya notaris, biaya materai, biaya BPKB, dan biaya blok 1x angsuran (Hosen, 2013). Maka, keduanya dapat dikatakan menghasilkan perbedaan pengelompokan, tetapi mengandung variabel yang hampir sama.

Penelitian lainnya yang dilakukan dengan meneliti kredit mikro bank di luar Indonesia menghasilkan bahwa komponen biaya transaksi dibedakan menurut cara pengukurannya, yakni terukur (langsung) dan tidak terukur (tidak langsung). Penelitian oleh Chodhury (2004), Anumpa (2006), Shankar (2007), Ghorbani (2012), Emanuel (2016), Antwi & Ohene (2017) menghasilkan kedua biaya tersebut. Biaya terukur disebut dengan biaya eksplisit, didalamnya berupa biaya administrasi, biaya penyusunan kontrak, biaya transportasi yang terdiri dari biaya pemrosesan & aplikasi,

biaya layanan konsultasi teknis dan layanan kualitatif, biaya jaminan, biaya hukum, biaya pemantauan dan pengawasan, biaya fasilitasi pertemuan, biaya kelayakan mengukur bisnis, biaya makanan dan minuman, biaya pelanggaran kontrak, biaya pengajuan kasus, biaya perekrutan pihak ketiga dan biaya lainnya. Sedangkan yang termasuk dalam biaya tidak terukur disebut biaya implisit yang mengacu pada biaya peluang dan waktu dalam bernegosiasi hingga memperoleh dan membayar kembali pinjamannya. Data biaya implisit diperoleh secara tidak langsung dengan menghitung nilai yang dihabiskan debitur pada setiap tahap transaksi pinjaman.

Hubungan antara biaya transaksi dan volume penyaluran KUR mikro di bank dalam penelitian-penelitian terdahulu dijelaskan secara implisit. Keseluruhan penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa semakin besar faktor-faktor biaya transaksi, maka akan semakin besar pula biaya transaksi yang ada didalam pemberian kredit. Dengan besarnya biaya transaksi pada kredit, maka dapat berpengaruh positif juga terhadap tingkat bunga nominal, jumlah bersih penerimaan kredit, dan biaya yang ditanggung debitur akan semakin tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan hubungan biaya transaksi dengan volume penyaluran kredit dalam penelitian ini yakni KUR mikro akan negatif. Hubungan negatif berarti ketika biaya transaksi tinggi, maka volume penyaluran KUR mikro rendah akibat dari keengganan calon debitur mengakses kredit dengan pertimbangan biaya-biaya yang menjadi komponen biaya transaksi yang harus ditanggung tidak seimbang dengan penerimaan bersih jumlah kredit. Pernyataan tersebut diperkuat dengan temuan bahwa dalam KUR mikro selain terdapat bunga nominal yang telah ditetapkan ternyata masih ada lagi biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah diluar biaya resmi yang telah ditetapkan (Gopar, 2010).

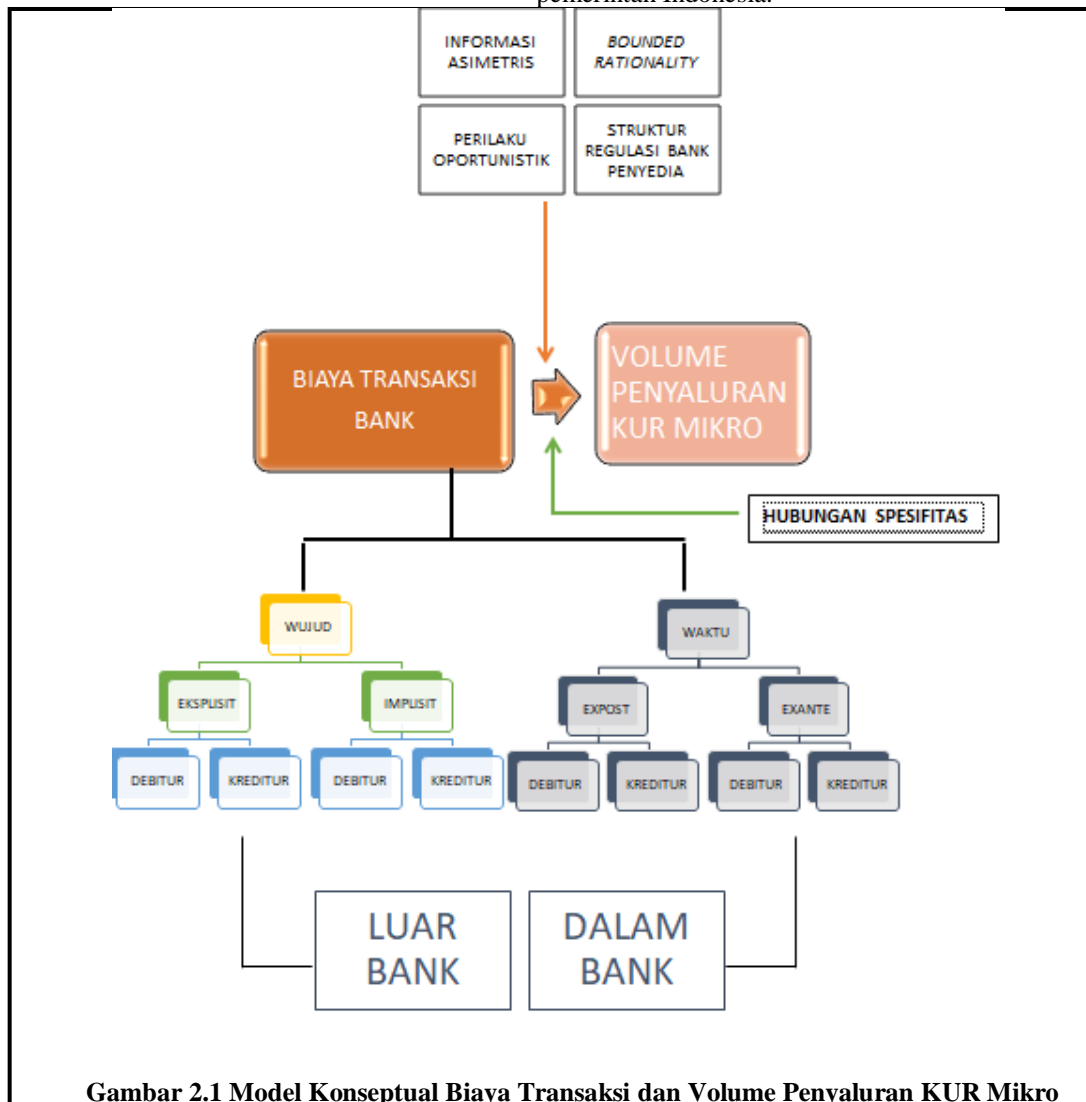
Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode review literatur untuk membangun model hubungan biaya transaksi dan penyaluran KUR Mikro. Metode ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah penentuan topik tentang biaya transaksi dan KUR Mikro, selanjutnya penelusuran sumber pustaka terkait di internet. Tahap kedua adalah memilih sumber pustaka relevan sesuai dengan kebutuhan analisis. Tahap ketiga adalah analisis sumber pustaka terpilih untuk mengidentifikasi komponen, factor penyebab, dan hubungan biaya transaksi dengan penyaluran KUR Mikro. Tahap keempat adalah membuat model konseptual hubungan biaya transaksi dan penyaluran KUR Mikro secara lengkap dengan menentukan factor penyebab, komponen-komponen, serta menjelaskan arah hubungan kausalitasnya.

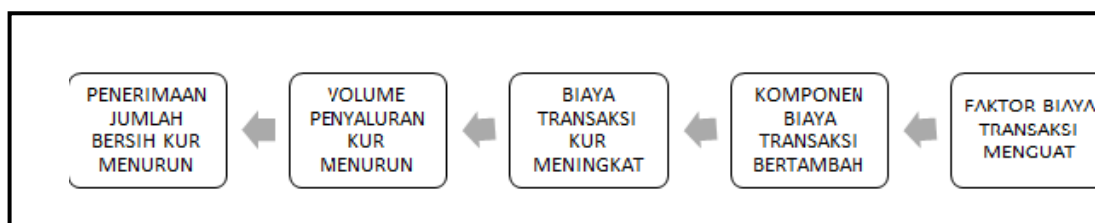
Hasil dan Pembahasan

Sejumlah literature tentang biaya transaksi dan penyaluran KUR menjadi sumber kajian penting dalam membuat model konseptual artikel ini. Berdasarkan hasil kajian literature dan analisis penulis, model konseptual biaya transaksi dan penyaluran KUR dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Biaya transaksi dalam pengelolaan dan penyaluran KUR menunjukkan variabel dependen yakni volume penyaluran KUR mikro dipengaruhi langsung oleh variabel independen yaitu biaya transaksi yang dikeluarkan oleh bank. Hubungan tersebut diperkuat dengan variabel moderator berupa informasi asimetris, *bounded rationality*, perilaku oportunistik, dan struktur regulasi bank penyedia, dimana semakin besar variabel moderator akan semakin berpengaruh kuat pada biaya transaksi terhadap volume penyaluran KUR mikro.

Namun, diduga terdapat variabel mediator yaitu hubungan spesifitas antara nasabah dengan bank yang menyediakan KUR mikro menjadi pengaruh tidak langsung antara besarnya biaya transaksi dengan volume penyaluran KUR mikro. Apabila dijelaskan sesuai dengan gambar 2.2, model kausalitas tersebut dapat diartikan bahwa ketika faktor-faktor biaya transaksi yaitu informasi asimetris, *bounded rationality*, perilaku oportunistik, dan struktur regulasi bank penyedia menguat, maka secara langsung akan mempengaruhi banyaknya komponen biaya transaksi yang harus dikeluarkan akan bertambah. Ketika hal tersebut terjadi, maka biaya transaksi yang ada didalam KUR mikro akan meningkat. Akibatnya penyaluran KUR mikro oleh bank akan menurun sehingga jumlah penerima atau debitur juga akan mengalami penurunan dalam segi jumlah bersih KUR mikro yang diperoleh. Hal ini dapat berimplikasi pada jumlah target penerima KUR mikro yang tidak mampu mencapai target pemerintah Indonesia.



Gambar 2.1 Model Konseptual Biaya Transaksi dan Volume Penyaluran KUR Mikro



Gambar 2.2 Model Kausalitas Biaya Transaksi dan Volume Penyaluran KUR Mikro

Kesimpulan

Komponen biaya transaksi yang muncul dalam pengelolaan dan penyaluran KUR mikro meliputi biaya transaksi diluar dan dalam bank. Biaya transaksi diluar bank termasuk biaya menyalin file yang dibutuhkan, biaya transportasi, biaya administrasi dokumen yang diperlukan, dan beban biaya kepada pelanggan untuk meninggalkan usahanya untuk memproses aplikasi KUR. Sedangkan biaya transaksi di dalam bank misalnya biaya pembukaan *passbook* bank, biaya administrasi, biaya jaminan, biaya asuransi, biaya notaris, bea materai dan biaya pendaftaran. Namun, apabila melihat dari pihak yang menanggung dibagi menjadi biaya transaksi debitur (biaya pengumpulan informasi, administrasi pinjaman, penegakan hukum, layanan konsultasi teknis, penilaian pemijam dan dokumentasi hingga pencairan & dan pemantauan pinjaman) dan biaya transaksi kreditur (biaya pendaftaran, biaya layanan, biaya foto, biaya peluang, biaya perjalanan, biaya tenaga ahli dan pengawas untuk melakukan pengawasan, dan *success fee*).

Faktor-faktor yang menyebabkan biaya transaksi adalah terbatasnya akses terhadap perbankan sebagai salah satu sumber permodalan terpenting atau informasi asimetris, *bounded rationality* yang ditunjukkan melalui hubungan kontrak yang terjadi dalam proses kredit mikro, perilaku oportunistik, dan struktur regulasi bank penyedia. Terdapat satu atau dua bahkan lebih komponen berbeda maupun sama yang terbentuk berdasarkan faktor-faktor yang dialami kedua bank tersebut sehingga menghasilkan tingkat biaya transaksi yang berbeda. Kedua perbedaan tersebut akan mengarah pada hubungan biaya transaksi pada pengelolaan dan volume penyaluran KUR mikro yaitu negative dimana ketika biaya transaksi tinggi, maka volume penyaluran KUR mikro rendah akibat dari keengganan calon debitur mengakses kredit dengan pertimbangan biaya-biaya yang menjadi komponen biaya transaksi yang harus ditanggung tidak seimbang dengan penerimaan bersih jumlah kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dow, Gregory K., 2018, *Transaction Cost Economics*, Columbia : University of Sydney Library.
- [2] Darabi, Hassan dan Jalali, Danon., 2018, *Illuminating The Formal–Informal Dichotomy In Land Development On The Basis Of Transaction Cost Theory*, *Journal Department of Environmental Design Engineering*, University of Tehran.
- [3] Chauhan , Bhawana, Sharma, Sudhir, Singh, Priti, dan Singh, Kratika., 2017, *Group Lending Model - A Panacea to Reduce Transaction Cost* , *Journal Zagreb International Review of Economics & Business*, Vol, 20, No, 2, pp, 46-63, 2017.
- [4] Antwi, Stephen dan Yankyira, Kwasi O., 2017, *Relationship Lending and Its Effects on Transaction Cost of Obtaining Credit, The Case of Maize Farmers in Ghana*, *Journal of Finance and Economics*, 2017, Vol, 5, No, 2, 38-49.
- [5] Nguvava, Heriel Emanuel., 2016, *Transaction Cost Determinants Of Credit Governance Structures Of Commercial Banks In Tanzania, A Thesis The Degree Of Doctor Of Philosophy Of The Open University Of Tanzania*.
- [6] Georgescu, Cristina E, dan Radu, Riana., 2015, *Identifying And Quantifying Components Of Transaction Costs In The Banking System*, *International Conference "Risk in Contemporary Economy"* ISSN-L 2067-0532 ISSN online 2344-5386.
- [7] Hosen, Muhammad Nadratuzaman., 2013, *Institutional Analysis of Bank Syariah Mandiri (BSM) in Channeling Credit Program for Small Enterprises (KUR) at Depok, West Java and Ciputat, South Tangerang*, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* December 2013, Vol, 3, No, 12 ISSN: 2222-6990.
- [8] C, Igwe dan Egbuson., 2013, *Determinants of Transaction Costs for Borrowers among Farmers in Ikwuano Local Government Area, Abia State, Nigeria*, *American Journal of Rural Development*, 2013, Vol, 1, No, 5, 116-120.
- [9] Brewin, D,G, Ghorbani, M, Hossine, S, Khaledi, M., 2012, *Analysis of Transaction Costs of Obtaining Credits in Rural Iran*, *Jurnal Agr, Sci, Tech*, (2012) Vol, 14: 243-256 243.

- [10] Gopar, Achmad, H., 2010, Analisis Biaya Transaksi Pada Kredit Usaha Rakyat, JURNAL Volume 5 - Agustus 2010 : 74 – 98.
- [11] Henry, Ssegguja., 2010, *Relationship Lending, Transaction Costs And The Lending Interest Rates Of Commercial Banks In Uganda*, A Dissertation A Master Of Science In Accounting And Finance Degree Of Makerere University.
- [12] Yustika, Ahmad E., 2008, *The Transaction Cost Of Sugarcane Farmers: An Explorative Study*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol, 23, No, 3, 2008, 283 – 301.
- [13] Furubotn, Eirik dan Richter, Rudolf, 2008., *Institutions and Economic Theory The Contribution of the New Institutional Economics Second Edition, Transaction Cost* (pp, 47-72), United States of America : The University Of Michigan Press.
- [14] Shankar, Savita., 2007, *Transaction costs in group microcredit in India*, Management Decision Vol, 45 No, 8, 2007.
- [15] Listiyanto, Eko dan Manzilati, Asfi., 2007, Analisis Biaya Transaksi Pada Industri Bank Umum Di Indonesia, *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol,1 No,1 Oktober 2007, 46-58.
- [16] Agarwal, Nitin, Bafna, Prashant, Patil, N., Ranade, Anupama Ranade., 2006, *Transaction Cost of Lending in Rural Finance, Working Paper Series Institute for Financial Management and Research Centre for Micro Finance*.
- [17] Choudhury, Saswati., 2004, *Transaction Cost and Asymmetry of Information -The Twin Odds of Indian Commercial Banks in Rural Credit Market: Theoretical Fragility*, MPRA Paper No, 34951.
- [18] Marufu, Desmond dan Masuko, Louis., 2003, *The Determinants of Transactions Cost And Access to Credit by SMEs and the Poor In Zimbabwe, Journal International Labour Organization* ISBN 92-2-113743-0 ISSN 1609-8382.
- [19] Cuevas, Carlos dan Meyer, Richard L., 1990, *Reducing The Transaction Costs Of Financial Intermediation: Theory And Innovations, Economics and Sociology Occasional Paper* No, 1710.